

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25 /SEOJK.03/2016

TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Rencana Bisnis Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, bank umum yang melaksanakan kegiatan secara konvensional, selanjutnya disebut Bank Umum, perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan asas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis, dan komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan serta pengembangan usaha Bank Umum.
2. Agar penyusunan Rencana Bisnis dapat dilakukan secara komprehensif, cakupan Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus secara konsolidasi mencakup pula Rencana Bisnis bagi UUS sebagai satu kesatuan. Rencana Bisnis untuk UUS disusun sebagai bagian tersendiri dari Rencana Bisnis Bank Umum.

3. Sejalan ...

3. Sejalan dengan penyusunan Rencana Bisnis secara komprehensif sebagaimana pada angka 2, Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi Bank Umum yang memiliki UUS juga harus secara konsolidasi mencakup laporan bagi UUS sebagai satu kesatuan laporan.
4. Penyusunan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi UUS mengacu pada Surat Edaran yang mengatur mengenai rencana bisnis bank umum syariah dan unit usaha syariah.

II. CAKUPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank, Rencana Bisnis Bank Umum paling sedikit mencakup ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank Umum saat ini, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya, rencana pendanaan, rencana penanaman dana, rencana penyertaan modal, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya. Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan bersifat minimum sehingga Bank Umum dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana pada angka I.

A. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun terakhir, antara lain aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga, dan rasio keuangan. Selain itu ringkasan eksekutif juga memuat target usaha Bank Umum dalam jangka pendek (1 tahun) sampai dengan jangka menengah (3 tahun).

Ringkasan eksekutif disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dan paling sedikit mencakup:

1. Visi dan Misi Bank

Bagian ini menguraikan visi dan misi yang menjadi tujuan Bank Umum pada masa mendatang.

2. Arah Kebijakan Bank

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan Bank Umum baik jangka pendek maupun jangka menengah.

3. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank

Bagian ini memberikan uraian mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank Umum untuk mencapai visi dan misi Bank Umum sesuai dengan arah kebijakan Bank Umum ke depan.

4. Indikator Keuangan Utama

Bagian ini antara lain memuat posisi aktual (per posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) maupun proyeksi. Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis tahun 2017 sebagai berikut:

Indikator	Aktual Sep 2016	Proyeksi						
		Des 2016	Tahun 2017				Des 2018	Des 2019
			Mar	Jun	Sep	Des		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)								
Rasio Modal Inti terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)								
Rasio Modal Inti Utama terhadap ATMR								
Rasio Modal Inti terhadap Total Aset								
<i>Return on Asset</i> (ROA)								
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)								
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)								

Indikator ...

Indikator	Aktual Sep 2016	Proyeksi						
		Des 2016	Tahun 2017				Des 2018	Des 2019
			Mar	Jun	Sep	Des		
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Cadangan Kerugian Penutupan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif.								
Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) <i>Gross</i>								
Rasio NPL <i>Nett</i>								
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Total Kredit								
Rasio Aset <i>Trading</i> , Tagihan Spot dan Derivatif, serta Aset <i>Fair Value Option</i> terhadap Total Aset								
Rasio Total Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek								
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)								

5. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Bagian ini menguraikan target atau fokus kegiatan usaha Bank Umum baik kuantitatif maupun kualitatif dalam jangka pendek maupun jangka menengah, sesuai dengan visi dan misi Bank Umum disertai dengan alasan pemilihan target, asumsi yang digunakan, dan strategi untuk mencapai target.

Target ...

Target jangka pendek, misalnya berupa target penurunan tingkat NPL, peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi. Sementara itu target jangka menengah, misalnya target pengembangan perbankan syariah dan target penerapan tata kelola.

B. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan dan strategi manajemen selama 1 (satu) tahun ke depan, yang paling sedikit memuat:

1. analisis posisi Bank Umum dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Bank Umum baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Bank Umum. Dalam melakukan analisa posisi, Bank menggunakan pendekatan tertentu, paling sedikit berupa analisa *strengths, weaknesses, opportunities*, dan *threats* (SWOT);
2. kebijakan manajemen (*policy statements*), meliputi informasi umum kebijakan Bank Umum yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha Bank Umum pada waktu yang akan datang;
3. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Bank Umum dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan;
4. strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Bank Umum yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal; dan
5. strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kebijakan remunerasi (*remuneration policies*), paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus, dan fasilitas lain yang bersifat

keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum, termasuk kepada pegawai.

C. Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja Bank Umum Saat Ini

Bagian ini berisi penjelasan baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai kondisi Bank Umum pada saat penyusunan Rencana Bisnis dan menyoroti hal-hal utama yang perlu mendapat perhatian atau permasalahan yang dihadapi serta hasil yang telah dicapai Bank Umum.

Bagian ini paling sedikit memuat uraian mengenai:

1. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk profil risiko untuk seluruh risiko

Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis.

Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi penilaian Bank Umum mengenai tingkat dan tren untuk seluruh risiko.

Tata cara penyusunan profil risiko dan evaluasi penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan Bank.

Dalam uraian ini termasuk pula evaluasi mengenai efektivitas dan hasil penerapan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan yang mengatur mengenai fungsi kepatuhan Bank.

Dalam penjelasan mengenai fungsi kepatuhan Bank Umum dimuat rencana kerja kepatuhan untuk 1 (satu) tahun ke depan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai fungsi kepatuhan Bank.

2. Penerapan Tata Kelola

Uraian mengenai penilaian penerapan tata kelola berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi Bank.

3. Kinerja ...

3. Kinerja Keuangan, khususnya Permodalan (*Capital*) dan Rentabilitas (*Earnings*)

Uraian mengenai kinerja keuangan Bank Umum termasuk hasil pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka memperbaiki kinerja Bank Umum (jika ada) sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Uraian mengenai kinerja permodalan mencakup kecukupan dan komposisi, serta kemampuan permodalan Bank Umum dalam mengcover risiko terhadap aset bermasalah, kemampuan Bank Umum untuk menambah modal dari laba operasional Bank Umum, kemampuan permodalan Bank Umum untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kemampuan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank Umum.

Uraian mengenai kinerja rentabilitas Bank Umum mencakup pencapaian *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), perkembangan dan prospek laba operasional, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan rasio beban operasional selain bunga terhadap pendapatan kegiatan utama.

4. Realisasi Pemberian Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Uraian mengenai realisasi pemberian kredit mencerminkan peranan Bank Umum dalam mendukung perkembangan UMKM. Pengelompokan UMKM mengacu pada kriteria usaha berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

5. Penerapan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Uraian mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah hanya diberlakukan bagi Bank Umum yang memiliki UUS.

D. Proyeksi Laporan Keuangan

Bagian ini memuat informasi mengenai kondisi keuangan Bank Umum posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bank) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi ...

Proyeksi tahun pertama disusun secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan ketiga disusun secara tahunan (posisi akhir tahun).

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud.

Asumsi makro antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sedangkan asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antar bank, pertumbuhan kredit industri perbankan, serta tingkat bunga kredit dan simpanan yang digunakan dalam menyusun Rencana Bisnis.

Proyeksi laporan keuangan disusun dengan mengacu pada:

1. Lampiran I : Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca)
2. Lampiran II : Proyeksi Laba Rugi
3. Lampiran III : Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi
4. Lampiran IV : Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

E. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

Bagian ini memuat rasio keuangan dan rasio tertentu lainnya posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Rasio Keuangan Pokok

Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling sedikit dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Proyeksi rasio-rasio tersebut antara lain rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, rasio ROA, rasio NIM, rasio *Non Performing Loan* (NPL), rasio aset likuid terhadap total aset, *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan rasio aset *trading*, tagihan spot dan derivatif, serta aset *Fair Value Option* terhadap total aset.

2. Pos-Pos Tertentu Lainnya

Proyeksi pos-pos tertentu lainnya meliputi proyeksi beberapa rasio terkait kredit kepada UMKM, rasio dana pendidikan, dan rasio aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank Umum terhadap modal.

Selain ...

Selain itu dicantumkan pula pos-pos tertentu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Proyeksi ini disusun dengan mengacu pada Lampiran V.

F. Rencana Pendanaan

Bagian ini mencerminkan posisi penghimpunan dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana serta strategi Bank Umum untuk merealisasikan rencana pendanaan.

Rencana pendanaan disusun dengan mengacu pada:

1. Lampiran VI : Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
2. Lampiran VII : Rencana Penerbitan Surat Berharga
3. Lampiran VIII : Rencana Pendanaan Lainnya

G. Rencana Penanaman Dana

Bagian ini mencerminkan posisi penanaman dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penyaluran dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan yang antara lain memberikan informasi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait, dan rincian rencana pemberian kredit, termasuk rencana pemberian kredit kepada kegiatan usaha tertentu. Jenis kegiatan usaha tertentu yang dicantumkan dalam rincian pemberian kredit mencerminkan fokus pemberian kredit Bank Umum berdasarkan jenis kegiatan usaha yang diprioritaskan, dan/atau signifikansi pangsa kredit maupun jumlah debitur.

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi Bank Umum untuk merealisasikan rencana penanaman dana.

Rencana penanaman dana ini disajikan dengan mengacu pada:

1. Lampiran IX : Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
2. Lampiran X.A. : Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur Inti

3. Lampiran X.B. : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu
4. Lampiran X.C.1 : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi
5. Lampiran X.C.2 : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan
6. Lampiran X.C.3 : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Provinsi
7. Lampiran X.D.1 : Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi
8. Lampiran X.D.2 : Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan
9. Lampiran X.D.3 : Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Provinsi
10. Lampiran XI : Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Surat Berharga
11. Lampiran XII : Rencana Penanaman Dana Lainnya

H. Rencana Penyertaan Modal

Bagian ini mencerminkan posisi penyertaan modal posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penyertaan modal untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan yang paling sedikit meliputi bidang usaha, perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan, dan persentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

Rencana penyertaan modal disusun dengan mengacu pada Lampiran XIII.

I. Rencana Permodalan

Bagian ini paling sedikit meliputi:

1. Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Proyeksi KPMM paling sedikit meliputi proyeksi modal, proyeksi Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan proyeksi rasio KPMM selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Proyeksi ...

Proyeksi pemenuhan KPMM ini disusun dengan mengacu pada Lampiran XIV.A. untuk Bank selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau Lampiran XIV.B. untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Rencana Perubahan Modal

Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal selama 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan maupun jumlah modal.

Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing shareholders*), rencana *Initial Public Offering* (IPO), *right issue*, penerbitan surat utang yang bersifat ekuitas, dan rencana penambahan modal lainnya, serta uraian mengenai rencana perubahan atau penggantian kepemilikan (jika ada).

Rencana perubahan modal disusun dengan mengacu pada Lampiran XV.

J. Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Bagian ini menguraikan informasi mengenai struktur organisasi dan kondisi SDM terkini, rencana pengembangan organisasi dan SDM yang sedang berlangsung, maupun rencana pengembangan terkait SDM lainnya paling sedikit selama 1 (satu) tahun ke depan yang antara lain memuat:

1. Rencana Pengembangan Organisasi

Rencana pengembangan organisasi antara lain mencakup rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan kemampuan, ukuran, dan kompleksitas usaha Bank Umum.

2. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Rencana pengembangan sistem informasi manajemen antara lain mencakup pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi untuk manajemen dan rencana pengembangan sistem akuntansi, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk rencana pengembangan tersebut.

3. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana pengembangan SDM antara lain rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya atau

anggaran ...

anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk pegawai, Direksi, dan Komisaris Bank Umum, serta rencana pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat tertentu.

4. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Penggunaan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)

Rencana pemanfaatan tenaga kerja asing antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Rencana penggunaan tenaga alih daya (*outsourcing*) yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan, antara lain mencakup rencana jumlah yang akan digunakan dan rencana penempatan tenaga alih daya (*outsourcing*).

Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing disusun dengan mengacu pada Lampiran XVI.

K. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang dicantumkan pada Rencana Bisnis adalah produk dan/atau aktivitas baru yang tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank dan kegiatan usaha berdasarkan modal inti Bank. Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling sedikit untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru disusun dengan mengacu pada Lampiran XVII.

L. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan yang meliputi kantor wilayah, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan/atau kantor di luar negeri untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Informasi yang dimuat dalam rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor antara lain meliputi informasi mengenai

kantor ...

kantor induk, rencana waktu pelaksanaan, perkiraan investasi, lokasi, dan keterangan lainnya.

Informasi mengenai lokasi untuk setiap jenis kantor, paling sedikit mencantumkan lokasi kabupaten atau kota secara jelas, dan untuk lokasi kantor yang berada di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling sedikit mencantumkan nama kota administrasi atau kabupaten administrasi. Khusus untuk kantor yang berlokasi di luar negeri, mencantumkan nama kota dan negara.

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor disusun dengan mengacu pada Lampiran XVIII.

M. Informasi Lainnya

Informasi lainnya memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan (jika ada) namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan pada huruf A sampai dengan huruf L, antara lain langkah-langkah penyelesaian kredit yang bermasalah termasuk agunan yang diambil alih (AYDA), aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank, *linkage program*, dan/atau pengembangan pelayanan Bank Umum.

Pengembangan pelayanan mencakup antara lain informasi rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah, rencana pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah, rencana upaya perlindungan nasabah, dan rencana penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Cakupan informasi yang dimuat dalam rencana upaya perlindungan nasabah meliputi antara lain rencana kegiatan edukasi dan rencana peningkatan sistem pelayanan pengaduan nasabah.

Pengertian AYDA mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

III. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan Bank Umum secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Laporan Realisasi Rencana Bisnis paling sedikit mencakup:

a. penjelasan ...

- a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus, dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya;
- b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi;
- c. tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
- d. rasio keuangan dan pos-pos tertentu; dan
- e. informasi lainnya, berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf d, antara lain meliputi laporan realisasi perubahan jaringan kantor dan laporan realisasi tenaga kerja asing.

Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara umum disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran XIX.A. : Laporan Realisasi Rencana Bisnis
 - b. Lampiran XIX.B. : Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu
 - c. Lampiran XIX.C. : Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
 - d. Lampiran XIX.D. : Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan kepada Tenaga Pendamping
2. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Cakupan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun oleh Dewan Komisaris paling sedikit meliputi penilaian mengenai:
- a. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis;
 - b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Umum secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), serta profil risiko Bank Umum terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas;
 - c. upaya memperbaiki kinerja Bank Umum, dalam hal dari hasil penilaian sebagaimana pada huruf b terjadi penurunan kinerja.

Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai dengan huruf c, dapat dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Umum.

Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris, Bank Umum harus memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun dengan mengacu pada Lampiran XX.

IV. JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank, Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, dalam hal:

1. Bank menyampaikan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan/atau
2. Bank Umum menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bank Umum dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dalam hal sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan, Bank Umum belum menyampaikan laporan dimaksud.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan contoh untuk menyusun Rencana Bisnis Tahun 2017. Untuk penyusunan Rencana Bisnis periode berikutnya, pencantuman tahun hendaknya disesuaikan.

Lampiran I sampai dengan Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. KETENTUAN ...

VI. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca)
Lampiran II	: Proyeksi Laba Rugi
Lampiran III	: Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi
Lampiran IV	: Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan
Lampiran V	: Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya
Lampiran VI	: Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
Lampiran VII	: Rencana Penerbitan Surat Berharga
Lampiran VIII	: Rencana Pendanaan Lainnya
Lampiran IX	: Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
Lampiran X	: <div> A. Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur Inti </div> <div> B. Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu </div> <div> C. <div> 1. Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi </div> <div> 2. Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan </div> <div> 3. Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Provinsi </div> </div> <div> D. <div> 1. Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi </div> <div> 2. Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan </div> <div> 3. Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Provinsi </div> </div>
Lampiran XI	: Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Surat Berharga
Lampiran XII	: Rencana Penanaman Dana Lainnya
Lampiran XIII	: Rencana Penyertaan Modal
Lampiran XIV	: <div> A. Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Bank selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri </div> <div> B. Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri </div>
Lampiran XV	: Rencana Perubahan Modal
Lampiran XVI	: Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing
Lampiran XVII	: Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru
Lampiran XVIII	: Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
Lampiran XIX	: <div> A. Laporan Realisasi Rencana Bisnis </div> <div> B. Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu </div> <div> C. Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor </div> <div> D. Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan kepada Tenaga Pendamping </div>
Lampiran XX	: Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

Format Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca)

PROYEKSI POSISI KEUANGAN (NERACA)

Bank : _____

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Aktual Sept 2016	Proyeksi						
			Des 2016	Tahun ke-1				Des 2018	Des 2019
				Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017		
ASET									
1.	Kas								
2.	Penempatan pada Bank Indonesia								
3.	Penempatan pada bank lain								
4.	Tagihan spot dan derivatif								
5.	Surat berharga								
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi								
	b. Tersedia untuk dijual								
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo								
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang								
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)								
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)								
8.	Tagihan akseptasi								
9.	Kredit yang diberikan								
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi								
	b. Tersedia untuk dijual								
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo								
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang								
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾								
11.	Penyertaan								
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan								
	a. Surat berharga								
	b. Kredit								
	c. Lainnya								
13.	Aset tidak berwujud								
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-								
14.	Aset tetap dan inventaris								
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-								
15.	Properti terbengkalai								
16.	Aset yang diambil alih								
17.	Rekening tunda								
18.	Aset antarkantor								
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia								
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia								
19.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya								
20.	Sewa pembiayaan ²⁾								
21.	Aset pajak tangguhan								
22.	Rupa-rupa aset								
	TOTAL ASET								

Format Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca)

PROYEKSI POSISI KEUANGAN (NERACA)

Bank : _____

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Aktual Sept 2016	Proyeksi						
			Des 2016	Tahun ke-1				Des 2018	Des 2019
				Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017		
KEWAJIBAN DAN MODAL									
1.	Giro								
2.	Tabungan								
3.	Simpanan berjangka								
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ³⁾								
5.	Kewajiban kepada Bank Indonesia								
6.	Kewajiban kepada bank lain								
7.	Kewajiban spot dan derivatif								
8.	Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)								
9.	Kewajiban akseptasi								
10.	Surat berharga yang diterbitkan								
11.	Pinjaman yang diterima								
12.	Setoran jaminan								
13.	Kewajiban antarkantor								
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia								
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia								
14.	Kewajiban pajak tangguhan								
15.	Rupa-rupa kewajiban								
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ³⁾								
17.	Modal pinjaman								
18.	Modal disetor								
19.	Tambahan modal disetor								
	a. Agio								
	b. Disagio -/-								
	c. Modal sumbangan								
	d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan								
	e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya								
	f. Lainnya								
	g. Dana setoran modal								
20.	Selisih penilaian kembali aset tetap								
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali								
22.	Cadangan								
	a. Cadangan umum								
	b. Cadangan tujuan								
23.	Laba/rugi								
	a. Tahun-tahun lalu								
	b. Tahun berjalan								
	TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL								

Keterangan :

- ¹⁾ Diisi bagi Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
- ²⁾ Diisi bagi Bank yang memiliki UUS, (jika ada).
- ³⁾ Diisi bagi Bank yang memiliki UUS, (jika ada).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Format Proyeksi Laba Rugi

PROYEKSI LABA RUGI

Bank :

(dalam jutaan rupiah)									
No	POS-POS	Aktual Sept 2016	Proyeksi						
			Des 2016	Tahun ke-1				Des 2018	Des 2019
				Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL									
A. Pendapatan dan Beban Bunga									
1.	Pendapatan Bunga								
	a. Rupiah								
	b. Valuta asing								
2.	Beban Bunga								
	a. Rupiah								
	b. Valuta asing								
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih								
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga									
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga								
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)								
	i. Surat berharga								
	ii. Kredit								
	iii. Spot dan derivatif								
	iv. Aset keuangan lainnya								
	b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)								
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan								
	i. Surat berharga								
	ii. Kredit								
	iii. Aset keuangan lainnya								
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)								
	e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> , komisi/provisi/fee dan administrasi								
	f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif								
	g. Pendapatan lainnya								

Format Proyeksi Laba Rugi

PROYEKSI LABA RUGI

Bank :

(dalam jutaan rupiah)									
No	POS-POS	Aktual Sept 2016	Proyeksi						
			Des 2016	Tahun ke-1				Des 2018	Des 2019
				Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017		
2. Beban Operasional Selain Bunga									
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif g. Penyisihan kerugian risiko operasional h. Kerugian terkait risiko operasional i. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> , komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) k. Penyisihan penghapusan aset non produktif l. Beban tenaga kerja m. Beban promosi n. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL									
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL									
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 1. Transfer laba (rugi) ke kantor pusat 2. Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM¹⁾									

Keterangan:
¹⁾ Khusus bagi bank yang berbentuk Perusahaan Terbuka (Tbk).

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Format Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi

PROYEKSI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank :

(dalam jutaan rupiah)								
No.	POS-POS	Aktual Sept 2016	Proyeksi					
			Des 2016	Tahun ke-1				Des 2018
				Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017	
I	TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya							
II	KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. <i>Committed</i> - Rupiah - Valuta asing ii. <i>Uncommitted</i> - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. <i>Committed</i> ii. <i>Uncommitted</i> 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. <i>Committed</i> i. Rupiah ii. Valuta asing b. <i>Uncommitted</i> i. Rupiah ii. Valuta asing 3. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan a. <i>L/C</i> luar negeri b. <i>L/C</i> dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya							
III.	TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya							
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya							
V.	LAINNYA 1. Penerusan Kredit 2. Aset Produktif yang dihapusbuku a. aset produktif i. Kredit yang diberikan ii. Lainnya b. Aset Produktif dihapusbuku yang Dipulihkan atau Berhasil ditagih i. Kredit yang diberikan ii. Lainnya 3. Aset Produktif yang dihapustagih i. Kredit yang diberikan i.1 Dialihkan kepada Badan Khusus i.2 Lainnya ii. Lainnya							

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Format Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

ASUMSI MAKRO DAN MIKRO YANG DIGUNAKAN

PT Bank _____

No.	Asumsi	Proyeksi					
		Tahun ke-1 ¹⁾				Des 2018	Des 2019
		Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017		
ASUMSI MAKRO							
1.	Pertumbuhan PDB (%)						
2.	Inflasi (%)						
3.	Lainnya, dirinci per jenis asumsi ²⁾						
ASUMSI MIKRO							
1.	Pertumbuhan Kredit (%)						
2.	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (%)						
3.	Tingkat Bunga Simpanan (%)						
4.	Tingkat Bunga Kredit (%)						
5.	Lainnya, dirinci per jenis asumsi ³⁾						

Keterangan:

- ¹⁾ Dalam hal tidak tersedia asumsi per triwulan, dapat menggunakan asumsi per tahun.
- ²⁾ Asumsi makro lainnya, seperti nilai tukar, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor.
- ³⁾ Asumsi mikro lainnya, seperti pangsa Bank terhadap industri.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Format Proyeksi Rasio-rasio dan Pos-pos Tertentu Lainnya

PROYEKSI RASIO-RASIO DAN POS-POS TERTENTU LAINNYA

PT BANK

No.	RASIO	Aktual Sept 2016	Proyeksi						
			Des 2016	Tahun ke-1				Des 2018	Des 2019
				Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017		
A.	RASIO KEUANGAN								
1	Rasio KPMM ¹⁾								
2	Rasio Modal Inti terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ²⁾								
3	Rasio Modal Inti Utama terhadap ATMR								
4	Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap								
5	Rasio Modal Inti terhadap Total Aset ²⁾								
6	ROE ¹⁾								
7	ROA ¹⁾								
8	NIM ¹⁾								
9	Rasio beban <i>overhead</i> terhadap pendapatan bersih kegiatan utama ²⁾								
10	BOPO ¹⁾								
11	Rasio <i>Fee Based Income</i> terhadap Total Pendapatan Operasional ²⁾								
12	Laba (rugi) Operasional								
13	Laba (rugi) tahun berjalan								
14	Rasio aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif ¹⁾								
15	Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ¹⁾								
16	Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif ¹⁾								
17	Rasio CKPN dan penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif TRA yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif ²⁾								
18	Rasio NPL - Gross ¹⁾ - Netto ¹⁾								
19	Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif ²⁾								
20	Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit ²⁾								
21	Rasio Agunan Yang Diambil Alih terhadap Total kredit								
22	Kredit yang diberikan - Rupiah - Valuta asing								
23	Fasilitas kredit kepada nasabah yg belum ditarik <i>committed</i> - Rupiah - Valuta asing <i>uncommitted</i> - Rupiah - Valuta asing								

Format Proyeksi Rasio-rasio dan Pos-pos Tertentu Lainnya

PROYEKSI RASIO-RASIO DAN POS-POS TERTENTU LAINNYA

PT BANK

No.	RASIO	Aktual Sept 2016	Proyeksi						
			Des 2016	Tahun ke-1				Des 2018	Des 2019
				Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017		
24	Rasio aset trading, tagihan spot dan derivatif, dan aset <i>Fair Value Option</i> terhadap total aset ²⁾								
25	Rasio spot dan derivatif terhadap total aset ²⁾								
26	Rasio aset likuid terhadap total aset ²⁾								
27	Rasio aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek ²⁾								
28	Rasio deposito inti terhadap Total Dana Pihak Ketiga ²⁾								
29	<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) ¹⁾								
30	Dana Pihak Ketiga								
	- Rupiah								
	- Valuta asing								
B.	RASIO-RASIO TERTENTU LAINNYA								
1	Rasio Total Kredit kepada Usaha Mikro terhadap Total Kredit kepada UMKM								
2	Rasio Total Kredit kepada Usaha Kecil terhadap Total Kredit kepada UMKM								
3	Rasio Total Kredit kepada Usaha Menengah terhadap Total Kredit kepada UMKM								
4	Rasio Total Kredit kepada UMKM terhadap Total Kredit								
5	a. Rasio Dana Pendidikan dan Latihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran SDM ³⁾								
	b. Rasio Sisa Anggaran Tahun ini yang digunakan untuk tahun berikutnya ⁴⁾								
6	Rasio Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal								

Keterangan:

- ¹⁾ Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
- ²⁾ Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman kepada penjelasan rasio keuangan pokok pada Lampiran V.
- ³⁾ Cakupan dana pendidikan dan latihan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
- ⁴⁾ Yang dimaksud dengan sisa anggaran adalah selisih antara kewajiban 5% dengan realisasinya.

PENJELASAN RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS-POS TERTENTU

PT BANK

No.	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
RASIO KEUANGAN			
1	Rasio Modal Inti terhadap ATMR	$\frac{\text{Modal Inti}}{\text{Total ATMR}}$	<ul style="list-style-type: none"> * Perhitungan Modal Inti mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. * Total ATMR meliputi ATMR untuk Risiko Kredit, ATMR untuk Risiko Operasional dan ATMR untuk Risiko Pasar.
2	Rasio Modal Inti terhadap Total Aset	$\frac{\text{Modal Inti}}{\text{Total Aset}}$	<ul style="list-style-type: none"> * Perhitungan Modal Inti mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. * Total aset meliputi total aset yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (neraca).
3	Rasio beban <i>overhead</i> terhadap pendapatan bersih kegiatan utama	$\frac{\text{Beban Overhead}}{\text{Pendapatan Bersih Kegiatan Utama}}$	<ul style="list-style-type: none"> * Beban Overhead meliputi : Penyusutan/ amortisasi aset tetap (Sandi 3340 + 3350 + 3360 + 3400) Biaya Tenaga kerja (Sandi 3640 + 3650 + 3690) Pendidikan & pelatihan (Sandi 3700) Premi Asuransi (Sandi 3110+3120+3130+3160) Kerugian karena risiko operasional (Sandi 3560+3561+3562+3563+3564+ 3565+3570) Penelitian dan Pengembangan (Sandi 3750) Sewa (Sandi 3800) Promosi (Sandi 3850) Pajak-pajak, tidak termasuk pajak penghasilan (Sandi 3900) Pemeliharaan dan perbaikan (Sandi 3950) Barang dan Jasa (Sandi 4000+4010) Lainnya (Sandi 4050) * Pendapatan bersih kegiatan utama meliputi pendapatan bunga bersih ditambah dengan pendapatan <i>fee</i> bersih. * Pendapatan bunga bersih adalah seluruh pendapatan bunga dikurangi seluruh beban bunga (selisih sandi 1750-1760). * Pendapatan <i>fee</i> bersih adalah seluruh pendapatan komisi/provisi/<i>fee</i> dikurangi seluruh beban komisi/provisi/<i>fee</i> yang berasal dari kegiatan kredit, transaksi derivatif, kredit kelolaan, dan lainnya { sandi (2190-3020) + sandi (2200-3030) + sandi (2210-3040) + sandi (2260-3100)}.
4	Rasio <i>Fee Based Income</i> terhadap Total Pendapatan Operasional	$\frac{\text{Fee Based Income}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$	<ul style="list-style-type: none"> * <i>Fee based income</i> meliputi pendapatan komisi/provisi/<i>fee</i> yang berasal dari kegiatan kredit, transaksi derivatif, kredit kelolaan, dan lainnya (sandi 2190 + sandi 2200 + sandi 2210 + sandi 2260). * Total pendapatan operasional meliputi pendapatan bunga dan pendapatan operasional selain bunga (Sandi 1000 + Sandi 1800).
5	Rasio CKPN dan penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif TRA yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif	$\frac{\text{CKPN Aset Produktif} + \text{PPA TRA}}{\text{PPA yang wajib dibentuk}}$	<ul style="list-style-type: none"> * CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Instrumen Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), yang mencakup CKPN Individual dan CKPN Kolektif.

PENJELASAN RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS-POS TERTENTU

PT BANK

No.	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
6	Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	$\frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Aset Produktif}}$	<ul style="list-style-type: none"> * Total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank. * Total aset produktif adalah kredit, surat berharga, penyertaan dan tagihan lainnya yang tercantum dalam neraca, baik kepada pihak ketiga bukan Bank maupun kepada Bank, termasuk kepada Bank Indonesia.
7	Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit	$\frac{\text{Kredit kepada Debitur Inti}}{\text{Total Kredit}}$	<ul style="list-style-type: none"> * Kredit kepada debitur Inti meliputi kredit kepada debitur atau grup diluar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. bagi Bank yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun meliputi kredit kepada 10 debitur atau grup besar; b. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp10 triliun meliputi kredit kepada 15 debitur atau grup besar; c. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10 triliun meliputi kredit kepada 25 debitur atau grup besar. * Total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank.
8	Aset <i>trading</i> , tagihan <i>spot</i> dan derivatif, dan aset <i>Fair Value Option</i> (FVO) terhadap total aset	$\frac{\text{Aset Trading} + \text{Tagihan Spot dan Derivatif} + \text{Aset FVO}}{\text{Total Aset}}$	<ul style="list-style-type: none"> * Aset <i>trading</i> meliputi kredit, penempatan pada Bank lain, tagihan akseptasi, surat berharga, surat berharga repo, surat berharga <i>reverse</i> repo, dan aset lainnya yang digolongkan dalam kelompok diperdagangkan. * Tagihan spot dan derivatif meliputi seluruh tagihan spot dan derivatif yang dikelompokkan sebagai posisi <i>trading book</i> baik untuk tujuan <i>trading</i> dan <i>hedging</i>. * Aset FVO meliputi kredit, penempatan pada Bank lain, tagihan akseptasi, surat berharga, surat berharga repo, surat berharga <i>reverse</i> repo, dan aset lainnya yang digolongkan dalam kelompok <i>Fair Value Option</i>. * Total aset meliputi total aset yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (neraca).
9	Rasio <i>spot</i> dan derivatif terhadap total aset	$\frac{\text{Tagihan Spot dan Derivatif}}{\text{Total Aset}}$	<ul style="list-style-type: none"> * Tagihan <i>spot</i> dan derivatif meliputi seluruh tagihan <i>spot</i> dan derivatif yang dikelompokkan sebagai posisi <i>trading book</i> baik untuk tujuan <i>trading</i> dan <i>hedging</i>. * Total aset meliputi total aset yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (neraca).
10	Rasio aset likuid terhadap total aset	$\frac{\text{Aset Likuid primer} + \text{Aset Likuid Sekunder}}{\text{Total Aset}}$	<ul style="list-style-type: none"> * Aset likuid primer meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia (FTO, FASBI), SBI kategori <i>trading</i>, AFS dan <i>hold to maturity</i>, dan seluruh surat berharga pemerintah kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu 1 tahun atau kurang. * Aset likuid sekunder meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. surat berharga Pemerintah kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu antara > 1 tahun s.d 5 tahun; b. surat berharga Pemerintah kategori <i>hold to maturity</i> dan memiliki sisa jangka waktu ≤ 1 tahun; c. surat berharga Pemerintah kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu > 5 tahun, dengan haircut 25% dari nilai pasar. * Total aset meliputi total aset yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (neraca).

PENJELASAN RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS-POS TERTENTU

PT BANK

No.	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
11	Rasio aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek	$\frac{\text{Aset Likuid Primer} + \text{Aset Likuid Sekunder}}{\text{Pendanaan Jangka Pendek (Short Term Funding)}}$	<ul style="list-style-type: none">* Aset likuid primer meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia (FTO, FASBI), SBI kategori <i>trading</i>, AFS dan <i>hold to maturity</i>, dan seluruh surat berharga pemerintah kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu ≤ 1 tahun.* Aset likuid sekunder meliputi :<ul style="list-style-type: none">a. surat berharga Pemerintah kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu antara > 1 tahun s.d 5 tahun;b. surat berharga Pemerintah kategori <i>hold to maturity</i> dan memiliki sisa jangka waktu ≤ 1 tahun;c. surat berharga Pemerintah kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu > 5 tahun dengan haircut 25% dari nilai pasar.* Pendanaan jangka pendek meliputi giro, tabungan, deposito dengan sisa jangka waktu ≤ 1 tahun.
12	Rasio deposito inti terhadap Total DPK	$\frac{\text{Deposito Inti}}{\text{DPK}}$	<ul style="list-style-type: none">* Deposito inti mencakup 10, 25, atau 50 <i>depositors</i> terbesar dari total simpanan, berupa giro, tabungan, dan deposito, dengan kriteria sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">a. bagi Bank yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp 1 triliun, meliputi 10 <i>depositors</i>;b. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp 1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp 10 triliun meliputi 25 <i>depositors</i>;c. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp 10 triliun meliputi 50 <i>depositors</i>.* Dana Pihak Ketiga (DPK) meliputi giro, tabungan dan deposito.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Format Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

RENCANA PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA

PT BANK _____

KELOMPOK	Aktual Sept 2016	Proyeksi				
		Des 2016	Tahun ke-1			
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
GIRO						
A. Pihak Terkait						
1. Rupiah						
2. Valuta Asing						
B. Pihak Tidak Terkait						
1. Rupiah						
2. Valuta Asing						
TOTAL GIRO¹⁾						
TABUNGAN						
A. Pihak Terkait						
1. Rupiah						
2. Valuta Asing						
B. Pihak Tidak Terkait						
1. Rupiah						
2. Valuta Asing						
TOTAL TABUNGAN²⁾						
DEPOSITO						
A. RUPIAH						
1. 1 bulan						
2. 3 bulan						
3. 6 bulan						
4. ≥ 12 bulan						
B. VALUTA ASING						
1. 1 bulan						
2. 3 bulan						
3. 6 bulan						
4. ≥ 12 bulan						
TOTAL DEPOSITO³⁾						
TOTAL PENGHIMPUNAN						
DANA PIHAK KETIGA						
TOTAL DEPOSAN INTI⁴⁾						
% DEPOSAN INTI TERHADAP						
DANA PIHAK KETIGA						

Keterangan:

- ¹⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Giro pada Lampiran I - Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca) No.1 sisi Kewajiban dan Modal.
- ²⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Tabungan pada Lampiran I - Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca) No.2 sisi Kewajiban dan Modal.
- ³⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Simpanan Berjangka pada Lampiran I - Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca) no.3 sisi Kewajiban dan Modal.
- ⁴⁾ Deposan inti mencakup 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima) atau 50 (lima puluh) *depositors* terbesar dari total simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. bagi Bank yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun, meliputi 10 (sepuluh) *depositors*;
- b. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp10 triliun meliputi 25 (dua puluh lima) *depositors*;
- c. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10 triliun meliputi 50 (lima puluh) *depositors*.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Format Rencana Penerbitan Surat Berharga

RENCANA PENERBITAN SURAT BERHARGA

PT BANK _____

jutaan Rp

Jenis	Aktual Sep 2016	Proyeksi				
		Des 2016	Tahun ke-1			
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
A. RUPIAH						
1. Obligasi						
2. <i>Medium Term Notes</i> (MTN)						
3. <i>Convertible bonds</i>						
4. Lainnya (dirinci sesuai jenis, misal CLN)						
a.						
b.						
dst						
Total Surat Berharga - Rupiah						
B. VALUTA ASING						
1. Obligasi						
2. <i>Medium Term Notes</i> (MTN)						
3. <i>Convertible bonds</i>						
4. Lainnya (dirinci sesuai jenis, misal CLN)						
a.						
b.						
dst						
Total Surat Berharga - Rupiah						
TOTAL SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN¹⁾						

Keterangan:

- ¹⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Surat Berharga yang diterbitkan pada Lampiran I - Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca) no.10 sisi Kewajiban dan Modal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Yuliana

NELSON TAMPUBOLON

Format Rencana Pendanaan Lainnya

RENCANA PENDANAAN LAINNYA¹⁾

PT BANK

jutaan Rp

Jenis Pendanaan Lain ¹⁾	Aktual Sep 2016	Proyeksi				
		Des 2016	Tahun ke-1			
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
JUMLAH						

Keterangan:

- ¹⁾ jenis pendanaan lainnya merupakan pendanaan selain dalam bentuk penghimpunan dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) dan penerbitan surat berharga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

NELSON TAMPUBOLON

LAMPIRAN X.B.

Format Rencana Pemberian Kredit Berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu

RENCANA PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU¹⁾

PT BANK

jutaan Rp

KEGIATAN USAHA	Aktual Sep 2016	Proyeksi				
		Des 2016	Tahun ke-1			
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
A. Properti						
B. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)						
C. Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahannya						
D. Pembiayaan Kendaraan Bermotor						
E. Pembiayaan Perumahan (KPR)						
F. Kartu Kredit						
G. Perusahaan Sekuritas						
H. Perusahaan Pembiayaan						
I. Industri Pariwisata						
J. Lainnya (dirinci sesuai dengan kegiatan usaha utama Bank, seperti : Perkapalan, Telekomunikasi, Pembangunan Jalan Tol, Pensiunan, Pegawai)						

Keterangan:

- ¹⁾ Jenis kegiatan usaha tertentu yang tercantum di lampiran ini hanya diisi untuk jenis usaha yang relevan sebagai fokus pemberian kredit Bank dan Bank dapat menambahkan jenis kegiatan usaha lain yang sesuai dengan jenis usaha yang menjadi fokus di masing-masing Bank. Untuk jenis kegiatan usaha yang tidak menjadi fokus pemberian kredit Bank, cukup diisi TS (tidak signifikan).

LAMPIRAN X.C.1.

Format Rencana Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

**RENCANA PEMBERIAN KREDIT
BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI¹⁾**

PT BANK

jutaan Rp

SEKTOR EKONOMI	Aktual Sep 2016	Proyeksi				
		Des 2016	Tahun ke-1			
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
A RUPIAH						
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan						
2 Perikanan						
3 Pertambangan dan Penggalian						
4 Industri Pengolahan						
5 Listrik, Gas, dan Air						
6 Konstruksi						
7 Perdagangan Besar dan Eceran						
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10 Perantara Keuangan						
11 <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
13 Jasa Pendidikan						
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya						
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga						
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
JUMLAH						
B VALUTA ASING						
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan						
2 Perikanan						
3 Pertambangan dan Penggalian						
4 Industri Pengolahan						
5 Listrik, Gas, dan Air						
6 Konstruksi						
7 Perdagangan Besar dan Eceran						
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10 Perantara Keuangan						
11 <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib						
13 Jasa Pendidikan						
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya						
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga						
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
JUMLAH						
JUMLAH RUPIAH + VALAS²⁾						

Keterangan:

¹⁾ Penjelasan mengenai kategori sektor ekonomi mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum yang berlaku untuk penjelasan klasifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi.

²⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total kredit pada Lampiran I - Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca) No.9 sisi Aset.

LAMPIRAN X.C.2.

Format Rencana Pemberian Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

RENCANA PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN

PT BANK

jutaan Rp

JENIS PENGGUNAAN	Aktual Sep 2016	Proyeksi				
		Des 2016	Tahun ke-1			
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
RUPIAH						
A. MODAL KERJA						
1. Ritel						
2. Korporasi						
3. Lainnya						
Total Kredit Modal Kerja						
B. INVESTASI						
1. Ritel						
2. Korporasi						
3. Lainnya						
Total Kredit Investasi						
C. KONSUMSI						
1. Ritel						
2. Korporasi						
3. Lainnya						
Total Kredit Konsumsi						
TOTAL RUPIAH						
VALUTA ASING						
A. MODAL KERJA						
1. Ritel						
2. Korporasi						
3. Lainnya						
Total Kredit Modal Kerja						
B. INVESTASI						
1. Ritel						
2. Korporasi						
3. Lainnya						
Total Kredit Investasi						
C. KONSUMSI						
1. Ritel						
2. Korporasi						
3. Lainnya						
Total Kredit Konsumsi						
TOTAL VALUTA ASING						
TOTAL RUPIAH + VALAS¹⁾						

Keterangan:

¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total kredit pada Lampiran I - Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca) No.9 sisi Aset.

LAMPIRAN X.C.3.

Format Rencana Pemberian Kredit Berdasarkan Provinsi

**RENCANA PEMBERIAN KREDIT
BERDASARKAN PROVINSI**

PT BANK

jutaan Rp

Provinsi	Aktual Sep 2016	Proyeksi				
		Des 2016	Tahun ke-1			
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
1 Jawa Barat						
2 Banten						
3 DKI Jakarta						
4 DI Yogyakarta						
5 Jawa Tengah						
6 ...dst						
JUMLAH¹⁾						

Catatan

Pembagian provinsi mengacu pada nama provinsi yang tercantum pada daftar sandi lokasi kabupaten/kota yang ada di Indonesia dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

Keterangan:

- ¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total kredit pada Lampiran I - Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca) No.9 sisi Aset.

LAMPIRAN X.D.1.

**Format Rencana Pemberian Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Berdasarkan Sektor Ekonomi**

**RENCANA PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI**

PT BANK

jutaan Rp

SEKTOR EKONOMI	Aktual Sep 2016	Proyeksi				
		Des 2016	Tahun ke-1			
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
A USAHA MIKRO						
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan						
2 Perikanan						
3 Pertambangan dan Penggalan						
4 Industri Pengolahan						
5 Listrik, Gas, dan Air						
6 Konstruksi						
7 Perdagangan Besar dan Eceran						
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10 Perantara Keuangan						
11 Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
13 Jasa Pendidikan						
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya						
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah						
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
JUMLAH KREDIT USAHA MIKRO						
B USAHA KECIL						
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan						
2 Perikanan						
3 Pertambangan dan Penggalan						
4 Industri Pengolahan						
5 Listrik, Gas, dan Air						
6 Konstruksi						
7 Perdagangan Besar dan Eceran						
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10 Perantara Keuangan						
11 Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
13 Jasa Pendidikan						
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya						
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah						
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
JUMLAH KREDIT USAHA KECIL						
C USAHA MENENGAH						
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan						
2 Perikanan						
3 Pertambangan dan Penggalan						
4 Industri Pengolahan						
5 Listrik, Gas, dan Air						
6 Konstruksi						
7 Perdagangan Besar dan Eceran						
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10 Perantara Keuangan						
11 Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
13 Jasa Pendidikan						
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya						
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah						
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
JUMLAH KREDIT USAHA MENENGAH						
JUMLAH KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH						
DAN MENENGAH						

LAMPIRAN X.D.2.

**Format Rencana Pemberian Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Berdasarkan Jenis Penggunaan**

**RENCANA PEMBERIAN KREDIT KEPADA
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN**

PT BANK

jutaan Rp

JENIS PENGGUNAAN	Aktual Sep 2016	Proyeksi				
		Des 2016	Tahun ke-1			
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
RUPIAH						
A. MODAL KERJA						
a. Mikro						
b. Kecil						
c. Menengah						
Total Kredit Modal Kerja						
B. INVESTASI						
a. Mikro						
b. Kecil						
c. Menengah						
Total Kredit Investasi						
TOTAL RUPIAH						
VALUTA ASING						
A. MODAL KERJA						
a. Mikro						
b. Kecil						
c. Menengah						
Total Kredit Modal Kerja						
B. INVESTASI						
a. Mikro						
b. Kecil						
c. Menengah						
Total Kredit Investasi						
TOTAL VALUTA ASING						
TOTAL RUPIAH + VALAS						

LAMPIRAN X.D.3.

Format Rencana Pemberian Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Provinsi

**RENCANA PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
BERDASARKAN PROVINSI (LOKASI PROYEK/DEBITUR)**

PT. BANK

jutaan Rp

Propinsi	Aktual Sep 2016	Proyeksi				
		Des 2016	Tahun ke-1			
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
A USAHA MIKRO						
1 Jawa Barat						
2 Banten						
3 DKI Jakarta						
4 DI Yogyakarta						
5 Jawa Tengah						
6 ...dst						
JUMLAH						
B USAHA KECIL						
1 Jawa Barat						
2 Banten						
3 DKI Jakarta						
4 DI Yogyakarta						
5 Jawa Tengah						
6 ...dst						
JUMLAH						
C USAHA MENENGAH						
1 Jawa Barat						
2 Banten						
3 DKI Jakarta						
4 DI Yogyakarta						
5 Jawa Tengah						
6 ...dst						
JUMLAH						
JUMLAH KREDIT UMKM						

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

ttd

Yuliana

NELSON TAMPUBOLON

Format Rencana Penanaman Dalam dalam Bentuk Surat Berharga

RENCANA PENANAMAN DANA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA

jutaan Rp

Jenis	Aktual Sep 2016	Proyeksi Tahun ke-1				
		Des 2016	Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
A. RUPIAH						
1 <u>Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>						
a. Obligasi Pemerintah / SUN						
b. Obligasi						
c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi)						
d. Surat Berharga Lainnya						
Total						
2 <u>Tersedia untuk dijual</u>						
a. Obligasi Pemerintah / SUN						
b. Obligasi						
c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi)						
d. Surat Berharga Lainnya						
Total						
3 <u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>						
a. Obligasi Pemerintah / SUN						
b. Obligasi						
c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi)						
d. Surat Berharga Lainnya						
Total						
4 <u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>						
a. Obligasi Pemerintah / SUN						
b. Obligasi						
c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi)						
d. Surat Berharga Lainnya						
Total						
Total Rupiah						
B. VALUTA ASING						
1 <u>Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>						
a. Obligasi Pemerintah / SUN						
b. Obligasi						
c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi)						
d. Surat Berharga Lainnya						
Total						
2 <u>Tersedia untuk dijual</u>						
a. Obligasi Pemerintah / SUN						
b. Obligasi						
c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi)						
d. Surat Berharga Lainnya						
Total						
3 <u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>						
a. Obligasi Pemerintah / SUN						
b. Obligasi						
c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi)						
d. Surat Berharga Lainnya						
Total						
4 <u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>						
a. Obligasi Pemerintah / SUN						
b. Obligasi						
c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi)						
d. Surat Berharga Lainnya						
Total						
Total Valuta Asing						
TOTAL RUPIAH DAN VALUTA ASING ¹⁾						

Keterangan:

¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total Surat Berharga pada Lampiran I - Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca) No.5 sisi Aset.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Format Rencana Penanaman Dana Lainnya

RENCANA PENANAMAN DANA LAINNYA

PT BANK

jutaan Rp

Jenis Penanaman Dana	Aktual Sep 2016	Proyeksi				
		Des 2016	Tahun ke-1			
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
JUMLAH						

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Format Rencana Penyertaan Modal

**RENCANA PENYERTAAN MODAL
PT BANK**

jutaan Rp

No.	Nama Perusahaan	Aktual Sep 2016	Proyeksi				
			Des 2016	Tahun ke-1			
				Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017
A.	PENYERTAAN MODAL						
1							
2							
3							
dst.							
	Total						
B.	PENYERTAAN MODAL SEMENTARA						
1							
2							
3							
dst.							
	Total						
	JUMLAH¹⁾						

Keterangan:

- ¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total Penyertaan pada Lampiran I - Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca) No.11 sisi Aset.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

ttd

NELSON TAMPUBOLON

LAMPIRAN XIV.A.

Format Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Selain Kantor Cabang dari bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

**PROYEKSI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
UNTUK BANK SELAIN KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

Bank :

(dalam jutaan rupiah)

		Aktual Sep 2016	Proyeksi					
			Des 2016	Tahun ke-1				Des 2018
				Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017	
I	Modal Inti (Tier 1)							
	1 Modal Inti Utama (CET 1)							
	1.1 Modal disetor (Setelah dikurangi Saham <i>Treasury</i>)							
	1.2 Cadangan Tambahan Modal ¹⁾							
	1.2.1 Agio/Disagio							
	1.2.2 Modal sumbangan							
	1.2.3 Cadangan umum							
	1.2.4 Laba/Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan							
	1.2.5 Laba/Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan							
	1.2.6 Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan							
	1.2.7 Dana setoran modal							
	1.2.8 Waran yang diterbitkan							
	1.2.9 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham							
	1.2.1 Pendapatan komprehensif lain							
	1.2.1 Saldo surplus revaluasi aset tetap							
	1.2.1 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif							
	1.2.1 Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung							
	1.2.1 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>							
	1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan							
	1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama ¹⁾							
	1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan							
	1.4.2 <i>Goodwill</i>							
	1.4.3 Aset tidak berwujud lainnya							
	1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang							
	1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi							
	1.4.6 Eksposur sekuritisasi							
	1.4.7 Faktor Pengurang modal inti lainnya							
	1.4.8 Investasi pada instrumen AT1 dan <i>Tier 2</i> pada bank lain ²⁾							
	2 Modal Inti Tambahan (AT-1) ¹⁾							
	2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1							
	2.2 Agio/Disagio							
	2.3 Faktor Pengurang: Investasi pada instrumen AT1 dan <i>Tier 2</i> pada bank lain ²⁾							
II	Modal Pelengkap (Tier 2)							
	1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan							
	2 Agio/disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal pelengkap							
	3 Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)							
	4 Cadangan tujuan							
	5 Faktor Pengurang Modal Pelengkap ¹⁾							
	5.1 <i>Sinking Fund</i>							
	5.2 Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> pada bank lain ²⁾							

Total Modal								
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO								
ATMR RISIKO KREDIT								
ATMR RISIKO PASAR								
ATMR RISIKO OPERASIONAL								
TOTAL ATMR								
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO								
ALOKASI PEMENUHAN KPMM								
Dari CET1								
Dari AT1								
Dari Tier 2								
RASIO KPMM								
Rasio CET1								
Rasio Tier 1								
Rasio Tier 2								
Rasio total								
CET 1 UNTUK BUFFER								
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK								
Capital Conservation Buffer ³⁾								
Countercyclical Buffer ⁴⁾								
Capital Surcharge untuk D-SIB ⁵⁾								

Keterangan:

¹⁾ Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.

²⁾ Investasi pada instrumen keuangan yang merupakan instrumen ekuitas yang diakui sebagai modal di bank lain dikurangkan pada masing-masing modal.

³⁾ Berlaku bagi Bank yang diwajibkan untuk membentuk *Capital Conservation Buffer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

⁴⁾ Berlaku bagi Bank yang diwajibkan untuk membentuk *Countercyclical Buffer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

⁵⁾ Berlaku bagi Bank yang diwajibkan untuk membentuk *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan *systemically important bank* dan *Capital Surcharge*.

LAMPIRAN XIV.B.

Format Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Kantor Cabang dari bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

PROYEKSI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
UNTUK KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Bank :

(dalam jutaan rupiah)

	Aktual Sep 2016	Proyeksi						
		Des 2016	Tahun ke-1				Des 2018	Des 2019
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017		
1. Dana Usaha								
1.1 Dana usaha								
1.2 Modal disetor								
2. Cadangan								
2.1 Cadangan umum								
2.2 Cadangan tujuan								
3. Laba/rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan								
4. Laba/rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan								
5. Revaluasi aset tetap								
6. Pendapatan komprehensif lainnya : keuntungan berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia utk dijual								
7. Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)								
8. Faktor pengurang modal¹⁾								
8.1 Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan								
8.2 Pendapatan komprehensif lain yang tidak dapat diperhitungkan								
8.3 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif								
8.4 Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung								
8.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>								
8.6 Perhitungan pajak tangguhan								
8.7 <i>Goodwill</i>								
8.8 Aset tidak berwujud lainnya								
8.9 Penyertaan								
8.10 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi								
8.11 Eksposur sekuritisasi								
TOTAL MODAL								
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO								
ATMR RISIKO KREDIT								
ATMR RISIKO PASAR								
ATMR RISIKO OPERASIONAL								
TOTAL ATMR								
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO								
RASIO KPMM								
BAGIAN DANA USAHA YANG DITEMPATKAN DALAM CEMA DIBAGI ATMR								
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK								
<i>Capital Conservation Buffer</i> ²⁾								
<i>Countercyclical Buffer</i> ³⁾								
<i>Capital Surcharge untuk D-SIB</i>								

Keterangan:

¹⁾ Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.

²⁾ Berlaku bagi Bank yang diwajibkan untuk membentuk *Capital Conservation Buffer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

³⁾ Berlaku bagi Bank yang diwajibkan untuk membentuk *Countercyclical Buffer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

-- ..

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

NELSON TAMPUBOLON

Format Rencana Perubahan Modal

RENCANA PERUBAHAN MODAL
PT BANK

jutaan Rp

	Aktual Sep 2016	Des 2016	Proyeksi					
			Tahun ke-1				Des 2018	Des 2019
			Maret 2017	Juni 2017	Sept 2017	Des 2017		
POSISI MODAL								
Pemegang Saham								
1								
2								
3								
4								
5								
Total Modal Disetor								
IPO (Initial Public Offering) - Go Public								
Right Issues								
Lainnya (seperti pinjaman subordinasi, modal pinjaman)								

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Format Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing

LAPORAN RENCANA PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING

PT Bank

No.	Bidang Tugas dan Posisi		Jumlah	Nama TKA	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan
	Posisi Jabatan	Lingkup					
1	Komisaris						
2	Direksi						
3	Pimpinan Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri						
4	Pemimpin Kantor Perwakilan						
5	Pejabat Eksekutif						
6	Tenaga Ahli/ Konsultan						
7	Jabatan lainnya ¹⁾						
Alasan pemanfaatan TKA serta alasan tidak/belum menggunakan Tenaga Kerja Indonesia:							
a.....							
b.....							
dst.....							

Keterangan:

¹⁾ jika ada, sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Format Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

RENCANA PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU¹⁾

BANK _____

No.	Jenis	Rencana Waktu Penerbitan dan/atau Pelaksanaan	Tujuan/Manfaat		Keterkaitan Produk dan/atau Aktivitas Baru dengan strategi Bank ²⁾	Deskripsi Umum ²⁾	Risiko yang mungkin Timbul ²⁾	Mitigasi Risiko atas penerbitanProduk dan/atau Aktivitas Baru
			Bagi Bank	Bagi Nasabah				
A.	PRODUK							
1								
2								
3								
4								
dst.								
B	AKTIVITAS							
1								
2								
3								
4								
dst.								

Keterangan:

¹⁾ Hanya untuk produk dan/atau aktivitas baru yang tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank.

²⁾ Penjelasan/Uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

Catatan:

Bagi Bank yang ingin menyelenggarakan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), rencana penyelenggaraan Laku Pandai juga disertai dengan informasi dan penjelasan mengenai jumlah dan jenis Agen yang ditargetkan per tahun selama 3 (tiga) tahun pertama penyelenggaraan dan untuk kerjasama pada tahun pertama disertai dengan rincian lokasi kabupaten atau kota.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Format Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

RENCANA PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

PT BANK

No	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN ¹⁾	PERKIRAAN INVESTASI (dalam Rupiah)	LOKASI ²⁾	KETERANGAN ³⁾
A. PEMBUKAAN						
1	KANTOR WILAYAH 1) dst.					
2	KANTOR CABANG 1) dst.					
3	KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.					
4	KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.					
5	KANTOR KAS 1) dst.					
6	KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.					
7	KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.					
B. PERUBAHAN STATUS						
1	KANTOR WILAYAH 1) dst.					
2	KANTOR CABANG 1) dst.					
3	KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.					
4	KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.					
5	KANTOR KAS 1) dst.					
6	KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.					
7	KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.					
C. PEMINDAHAN ALAMAT						
1	KANTOR WILAYAH 1) dst.					
2	KANTOR CABANG 1) dst.					
3	KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.					
4	KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.					
5	KANTOR KAS 1) dst.					
6	KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.					
7	KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.					
D. PENUTUPAN						
1	KANTOR WILAYAH 1) dst.					
2	KANTOR CABANG 1) dst.					
3	KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.					
4	KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.					
5	KANTOR KAS 1) dst.					
6	KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.					
7	KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.					

Catatan:
Form ini dilengkapi dengan perhitungan ketersediaan alokasi modal inti dengan mengacu pada ketentuan mengenai pembukaan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Keterangan:
1) Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
2) Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama kota administrasi atau kabupaten administrasi. Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling sedikit mencantumkan nama kabupaten atau kota.
3) Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

LAMPIRAN XIX.B.

Format Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu

LAPORAN REALISASI RASIO KEUANGAN DAN POS-POS TERTENTU

PT BANK

No.	RASIO	TARGET	REALISASI	DEVIASI	KETERANGAN
A.	RASIO KEUANGAN				
1	Rasio KPMM ¹⁾				
2	Rasio Modal Inti terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ²⁾				
3	Rasio Modal Inti Utama terhadap ATMR				
4	Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap				
5	Rasio Modal Inti terhadap Total Aset ²⁾				
6	ROE ¹⁾				
7	ROA ¹⁾				
8	NIM ¹⁾				
9	Rasio beban <i>overhead</i> terhadap pendapatan bersih kegiatan utama ²⁾				
10	BOPO ¹⁾				
11	Rasio <i>Fee Based Income</i> terhadap Total Pendapatan Operasional ²⁾				
12	Laba (rugi) Operasional				
13	Laba (rugi) tahun berjalan				
14	Rasio aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif ¹⁾				
15	Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ¹⁾				
16	Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif ¹⁾				
17	Rasio CKPN dan penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif TRA yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif ²⁾				
18	Rasio NPL				
	- <i>Gross</i> ¹⁾				
	- <i>Netto</i> ¹⁾				
19	Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif ²⁾				
20	Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit ²⁾				
21	Rasio Agunan Yang Diambil Alih terhadap Total kredit				
22	Kredit yang diberikan				
	- Rupiah				
	- Valuta asing				
23	Fasilitas kredit kepada nasabah yg belum ditarik				
	<i>committed</i>				
	- Rupiah				
	- Valuta asing				
	<i>uncommitted</i>				
	- Rupiah				

Format Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu

LAPORAN REALISASI RASIO KEUANGAN DAN POS-POS TERTENTU

PT BANK

No.	RASIO	TARGET	REALISASI	DEVIASI	KETERANGAN
	- Valuta asing				

Format Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu

LAPORAN REALISASI RASIO KEUANGAN DAN POS-POS TERTENTU

PT BANK

No.	RASIO	TARGET	REALISASI	DEVIASI	KETERANGAN
24	Rasio aset <i>trading</i> , tagihan spot dan derivatif, dan aset <i>Fair Value Option</i> terhadap total aset ²⁾				
25	Rasio spot dan derivatif terhadap total aset ²⁾				
26	Rasio aset likuid terhadap total aset ²⁾				
27	Rasio aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek ²⁾				
28	Rasio deposito inti terhadap Total Dana Pihak Ketiga ²⁾				
29	<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) ¹⁾				
30	Dana Pihak Ketiga				
	- Rupiah				
	- Valuta asing				
B.	RASIO-RASIO TERTENTU LAINNYA				
1	Rasio Total Kredit kepada Usaha Mikro terhadap Total Kredit kepada UMKM				
2	Rasio Total Kredit kepada Usaha Kecil terhadap Total Kredit kepada UMKM				
3	Rasio Total Kredit kepada Usaha Menengah terhadap Total Kredit kepada UMKM				
4	Rasio Total Kredit kepada UMKM terhadap Total Kredit				
5	a. Rasio Dana Pendidikan dan Latihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran SDM ³⁾				
	b. Rasio Sisa Anggaran Tahun ini yang digunakan untuk tahun berikutnya ⁴⁾				
6	Rasio Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal				

Keterangan:

- ¹⁾ Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
- ²⁾ Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman kepada penjelasan rasio keuangan pokok pada Lampiran V.
- ³⁾ Cakupan dana pendidikan dan latihan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
- ⁴⁾ Yang dimaksud dengan sisa anggaran adalah selisih antara kewajiban 5% dengan realisasinya.

LAMPIRAN XIX.C.

Format Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

LAPORAN REALISASI PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

PT BANK

Periode :

No	NAMA KANTOR	KANTOR INDUK	TANGGAL REALISASI	LOKASI ¹⁾	KETERANGAN ²⁾
A. PEMBUKAAN					
1	KANTOR WILAYAH 1) dst.				
2	KANTOR CABANG 1) dst.				
3	KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.				
4	KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.				
5	KANTOR KAS 1) dst.				
6	KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.				
7	KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.				
B. PERUBAHAN STATUS					
1	KANTOR WILAYAH 1) dst.				
2	KANTOR CABANG 1) dst.				
3	KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.				
4	KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.				
5	KANTOR KAS 1) dst.				
6	KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.				
7	KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.				
C. PEMINDAHAN ALAMAT					
1	KANTOR WILAYAH 1) dst.				
2	KANTOR CABANG 1) dst.				
3	KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.				
4	KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.				
5	KANTOR KAS 1)				

Format Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

LAPORAN REALISASI PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

PT BANK

Periode :

No	NAMA KANTOR		KANTOR INDUK	TANGGAL REALISASI	LOKASI ¹⁾	KETERANGAN ²⁾
	dst.					

Format Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

LAPORAN REALISASI PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

PT BANK

Periode :

No	NAMA KANTOR	KANTOR INDUK	TANGGAL REALISASI	LOKASI ¹⁾	KETERANGAN ²⁾
6	KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.				
7	KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.				
D. PENUTUPAN					
1	KANTOR WILAYAH 1) dst.				
2	KANTOR CABANG 1) dst.				
3	KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.				
4	KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.				
5	KANTOR KAS 1) dst.				
6	KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.				
7	KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.				

Keterangan:

- ¹⁾ a). Secara umum, untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama kota administrasi atau kabupaten administrasi.
Sedangkan untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling sedikit mencantumkan nama kabupaten atau kota, dan untuk kantor di luar negeri mencantumkan nama kota dan negara.
- b). Alamat lengkap lokasi wajib disebutkan untuk:
- pembukaan kantor kas, dan/atau kegiatan pelayanan kas
 - pemindahan kantor wilayah, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan/atau kantor fungsional yang tidak melakukan kegiatan operasional; dan/atau
 - penutupan kantor wilayah, kantor kas, dan/atau kegiatan pelayanan kas.
- ²⁾ Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

LAMPIRAN XIX.D.

Format Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan kepada Tenaga Pendamping

**LAPORAN REALISASI PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING
DAN ALIH PENGETAHUAN KEPADA TENAGA PENDAMPING**

PT Bank
Periode : _____

No.	Nama TKA	Bidang Tugas	Posisi/ Jabatan		Nama Pendamping	Hasil Evaluasi Terhadap Pendamping	Pendidikan/ Pelatihan kepada Pendamping	Lembaga Pelaksana	Keterangan
			TKA	Pendamping					
1					1 2				
2					1 2				
dst.					dst.				

LAPORAN REALISASI PELATIHAN ATAU PENGAJARAN OLEH TENAGA KERJA ASING¹⁾

No.	Nama TKA	Waktu Pelatihan/ Pengajaran	Lokasi Pelatihan/ Pengajaran	Jumlah Peserta	Jangka Waktu	Materi/ Topik
1		1 2				
2		1 2				
dst.		dst.				

Keterangan:

¹⁾ Disertai lampiran foto-foto kegiatan pelatihan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Format Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS¹⁾

PT Bank _____
PERIODE : _____

- a. Penilaian Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis²⁾
- b. Penilaian Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas²⁾
- c. Penilaian Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank, dalam hal menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas terdapat penurunan²⁾

Keterangan:

- ¹⁾ Jumlah halaman atau ukuran dalam contoh lampiran ini tidak mengikat sehingga Bank dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan dalam lembaran yang terpisah.
- ²⁾ Penilaian Komisaris pada huruf a sampai huruf c dapat dilengkapi pula dengan penilaian yang bersangkutan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON